

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu untuk memahami eksistensi kepolisian tidak dapat dilepaskan dengan fungsi dan organ atau lembaga kepolisian.<sup>1</sup>

Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) berbunyi bahwa :<sup>2</sup>

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Serta tidak dapat dilepaskan dari konsep pemikiran tentang adanya perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam perspektif fungsi maupun lembaga, Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram. Pada pengertian di atas, dapat diketahui bahwa POLRI sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara yang substansinya

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>2</sup>Ibid

memuat hal di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan sesuatu yang sakral karena bersifat bathin dan kekal yang berdasarkan hak asasi manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu pernyataan tentang tujuan POLRI sangat penting artinya bagi pembentukan jati diri POLRI, karena tujuan akan memberikan batasan dan arah tentang apa yang harus dicapai melalui penyelenggaraan fungsi POLRI dalam keseluruhan perjuangan bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Kejelasan tujuan POLRI akan memberikan pula kejelasan visi dan misi yang diemban POLRI sehingga pada gilirannya akan merupakan pedoman bagi penentuan metode pelaksanaan tugasnya secara tepat.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum POLRI wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :<sup>3</sup>

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Undang - Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang POLRI diatur dengan lengkap dan runtut mengenai tugas dan wewenang POLRI, namun

---

<sup>3</sup>Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.32.

ada saja penyimpangan - penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI tersebut dalam menjalankan tugasnya. Penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI merupakan suatu pelanggaran kode etik yang jarang didengar namun banyak terjadi dikota-kota tertentu.

Apabila masyarakat melihat suatu penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh oknum POLRI dalam keadaan tertentu masyarakat jarang melaporkan bahkan tidak mau melaporkan penyimpangan tersebut karena tidak ingin berurusan dengan pihak POLRI, padahal keadaan tersebut harus dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (selanjutnya disingkat SPK) pada kantor POLRI terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara di lingkungan peradilan umum.<sup>4</sup>

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh oknum POLRI merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota POLRI yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan juga PERKAP No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Upaya dalam menegakan Kode Etik Profesi POLRI sangat dibutuhkan oleh Institusi Kepolisian Republik Indonesia untuk terciptanya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada prinsip profesionalisme POLRI.

Seringnya diberitakan di berbagai media massa mengenai tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota POLRI misalnya banyaknya kasus

---

<sup>4</sup>Ryandra Fahlevi, Anugrah. 2015. *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia*, skripsi, Makassar: jurusan hukum, universitas hasanuddin Makassar.

penyalahgunaan senjata api oleh anggota POLRI, adanya anggota POLRI yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota POLRI, termasuk dalam hal ini kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota POLRI di wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Utara. yang nantinya akan dilakukannya penelitian oleh penulis.

Penulis akan menguraikan posisi kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh GB (23) berstatus Bripda anggota Sium Polsek Koja, telah kedapatan memiliki dan menguasai jenis narkoba golongan I yaitu ganja sesuai Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.<sup>5</sup> sebagaimana yang dimaksud pada hari Kamis tgl 22 Januari 2015 pukul.09.30 WIB, Bripda GB masih tidur di ruang pos jaga depan lantai II Mapolres, Namun karena dicurigai masih mengkonsumsi narkoba selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badanya, ternyata ditemukan satu bungkus Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja.

Dari penyimpangan anggota Polri tersebut menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok POLRI dan Kode Etik Profesi Eyang disebutkan dalam Pasal 4 UURI No 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang berbunyi :

“Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat, serta terbina ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

---

<sup>5</sup>Laporan Kepolisian Nomor : LP/03/1/2015/Sippropam

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi pasal

13 ayat 1 huruf (f), pasal 21 ayat 3 huruf (f) yang berbunyi :<sup>6</sup>

Pasal 13 ayat 1 huruf (f) :

Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;

Pasal 21 ayat 3 huruf (f) :

Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:

1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
3. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.

Seperti kita ketahui, POLRI (mulai dalam bentuknya yang amat sederhana sampai POLRI modern) dimanapun di dunia ini mempunyai dua peran sekaligus.

1. POLRI adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban atau orde masyarakat, agar tercapai suasana kehidupan aman, tentram dan damai.
2. POLRI adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup dimasyarakat.<sup>7</sup>

POLRI sebagai salah satu aparat penegak hukum yang sebagaimana tugas pokoknya adalah menjaga dan menegakkan hukum, kini timbul pernyataan, bahwabagaimana kemudian kalau ketika POLRI yang seharusnya menegakkan hukum tetapi melanggar hukum itu sendiri dan melanggar kode etiknya.

---

<sup>6</sup>*Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Etika Profesi Polri*

<sup>7</sup>Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya, Laksbang Grafika, 2014 hlm 187

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk mengkaji dalam sebuah bentuk skripsi dengan judul **“PROSES PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BERUPA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi POLRI?
2. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran kode etik profesi POLRI kepada anggota POLRI yang melakukan tindak pidana ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran kode etik POLRI yang termasuk tindak pidana.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik profesi POLRI terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini baik secara teoritis dan praktis adalah :

### **1.4.a Manfaat Teoritis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu Hukum Pidana ada umumnya dan tentang cara membangun citra yang baik dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia.

#### 1.4.b Manfaat praktis

- a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai gambaran tentang aparat penegak hukum.
- b. Serta memberikan pemahaman yang seharusnya dilakukan dalam menyelesaikan pelanggaran Kode Etik Kepolisian.

#### 1.5 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini akan memiliki kegunaan sebagai berikut :

##### 1.5.a Bagi penulis

Penelitian ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang dikaji oleh penulis, sekaligus sebagai syarat untuk penulisan tugas akhir dan menyelesaikan studi strata I di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

##### 1.5.b Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dikampus Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik profesi berupa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian republik Indonesia (studi kasus di

Polres Metro Jakarta Utara) Secara akademis di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Bagi pengembangan keilmuan hukum pidana terutama pada kode etik profesi.
2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
3. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

#### 1.5.c Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang konkrit atas studi kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat mampu memahami batasan-batasan tentang pelanggaran kode etik polri.

#### 1.5.d Bagi Aparat Penegak Hukum

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

### 1.6 Metode Penelitian

#### 1.6.a Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris. karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lembaga hukum Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data



sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelanggaran kode etik profesi berupa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penulis akan mengkaji terkait proses pemeriksaan kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik profesi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara.

#### 1.6.b Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban terhadap kasus yang diteliti. Lokasi yang penulis tetapkan dalam melakukan penelitian ini adalah di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Polres Metro Jakarta Utara adalah karena surat perintah penyidik dan proses pemeriksaan anggotanya dilakukan oleh tim Polres Metro Jakarta Utara itu sendiri sesuai kasus dan locus delicti yang penulis kaji, Sehingga Polres Metro Jakarta Utara mempunyai data yang akurat terkait dengan penulisan penulis.

#### 1.6.c Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis data yaitu:

##### a. Data Primer

Data Primer/bahan hukum yaitu primer data/bahan hukum yang didapat langsung dari lokasi penelitian. Data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber yang menangani kasus pelanggaran kode etik profesi yaitu bpk. Supriyanta PANIT I selaku PROVOS SIPPROPAM dan bpk. Rusadi Paurmin selaku SIPPROPAM

yang bertugas diwilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara agar dapat memberikan fakta-fakta dan informasi ataupun dokumen tertulis terkait kasus tersebut.

b. Data Sekunder

Data berupa dokumen-dokumen penting yang didapatkan oleh peneliti. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut Antara lain :

1. Bahan hukum primer, yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Seperti : Pancasila, UUD 1945, Undang-undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi, PP No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan kode etik profesi POLRI.

### **1.7 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu penulis memperoleh dan mengumpulkan data melalui proses tanya jawab secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah dibuat terlebih dahulu kepada responden yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu bpk. Supriyanta PANIT I selaku PROVOS SIPPROPAM

dan bpk. Rusadi Paurmin selaku SIPPROPAM Polres Metro Jakarta Utara yang menangani kasus tersebut.

Proses wawancara yang nantinya akan disampaikan oleh penulis Antara lain adalah bentuk-bentuk pelanggaran kode etik Polri yang termasuk tindak pidana dan proses pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran kode etik profesi Polri kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

b. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan hukum yang diperoleh penulis dari buku-buku dan karya ilmiah tentang pelanggaran kode etik profesi Polri berupa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian, dalam penelitian ini yang akan digunakan oleh penulis sebagai dasar informasi dan pertimbangan.

c. Studi Dokumentasi

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan hukum yang diperoleh penulis yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, Perkap Nomor 14 tahun 2011, PP Nomor 2 tahun 2003, laporan Polisi dan Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri dari Polres Metro Jakarta Utara.

## **1.8 Analisis Data**

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif hasil yang didapat berupa penjelasan, catatan, observasi, wawancara dan dokumen. Selain itu teknik analisa data yang

dilakukan penulis yaitu dengan mengkaji, mengolah, dan membahas informasi yang diperoleh secara ilmiah berupa teknik Metode analisa Kualitatif, yaitu suatu metode analisa data penelitian dengan cara menganalisis isi/kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian, mendiskripsikan, menggambarkan, dan menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk dikaitkan dengan teori-teori dan penjelasan yang berkaitan permasalahan yang ada sehingga pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien dalam suatu kesimpulan.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penulis membagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar mempermudah pemahaman. diantaranya adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Kegunaan Penelitian
- f. Metode Penelitian
- g. Teknik Pengumpulan Data
- h. Analisis Data
- i. Sistematika Penulisan

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- a. Pelanggaran
- b. Kode Etik Profesi
- c. Tindak Pidana
- d. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- a. Gambar Umum Tentang Polda Metro Jaya
- b. Struktur Organisasi Polda Metro jaya
- c. Hasil Penelitian

### **BAB IV PENUTUP**

- a. Kesimpulan
- b. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

Yang terakhir adalah pencantuman referensi-referensi atau sumber-sumber data yang penulis kutip.